



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
PEMERINTAH KOTA BLITAR**

**2023**



# RENCANA KERJA BKPSDM

**TEMA TAHUN II RPJMD 2021-2026**

*Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, Berbasis Teknologi Informasi (Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021)*

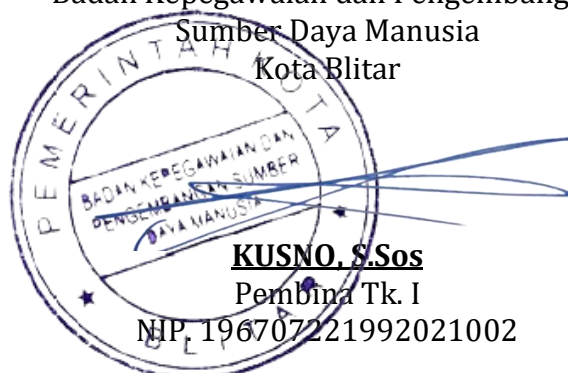
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia dan ridhaNya, Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2023 telah selesai disusun. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2023. Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian.

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Melalui Renja ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2023 untuk dapat konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreativitas guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perwujudan aparatur yang berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).

Masukan mengenai penyempurnaan Rencana Kerja ini sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan bagi Pemerintah Kota Blitar umumnya dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada khususnya.

Blitar, 4 Agustus 2022  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia  
Kota Blitar



**KUSNO. S.Sos**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196707221992021002

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang .....	6
1.2 Landasan Hukum .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	12
2.1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah ..	38
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	39
2.5. Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat ....	51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	52
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	52
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....	52
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, LOKASI, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	55
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Catatan Penting.....	69
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	69
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	70

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia s.d Tahun 2022 Kota Blitar.....	15
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar (Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021) .....	34
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026) .....	37
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar ..	41
Tabel 2.5	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Blitar .....	51
Tabel 3.1	Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar .....	57
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.....	59
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Blitar .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar.....	33
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 dimulai dengan persiapan penyusunan dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, serta mengacu Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan RKPD. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perwujudan aparatur yang berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diawali dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja BKPSDM, orientasi mengenai Renja BKPSDM, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPSDM yang



meliputi tahap perumusan rancangan Renja BKPSDM dan tahap penyajian rancangan Renja BKPSDM. Proses penyusunan Renja BKPSDM diakhiri dengan penetapan Renja BKPSDM. Penetapan rancangan akhir Renja BKPSDM dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala BKPSDM menetapkan Renja BKPSDM untuk menjadi pedoman di lingkungan BKPSDM dalam menyusun program dan kegiatan prioritas BKPSDM pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, yang menjadi tahun peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan tema: ***Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional Berbasis Teknologi Informasi.***

Normalisasi ekonomi daerah dimaksud adalah normalisasi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 disamping mengarah pada isu strategis daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan layanan perdagangan dan jasa, dan pemantapan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan, kebudayaan dan lingkungan hidup. Tema tersebut sejalan dengan upaya pencapaian misi 3 RPJMD “Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Perdagangan Berbasis Digital”.

Sedangkan tema pelayanan publik dan tata kelola mengarah pada isu strategis daerah dalam pemantapan penerapan *good governance* dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi. Sebagai upaya pencapaian misi 5 RPJMD “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”, maka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan menjadi penekanan pada tahun 2023 ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

Namun disamping penekanan pada normalisasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan sebagai tema utama, tahun 2023 juga diarahkan untuk mendorong isu-isu strategis daerah terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan dan sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan, dan peningkatan nilai-nilai religius dan sosial dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis, dan demokratis.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar senantiasa mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021; dan
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
25. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 tentang RKPD tahun 2023
26. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor.... Tahun 2022 tentang penetapan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
27. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor .....Tahun 2022 tentang penetapan perwali RKPD Tahun 2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2023 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2023 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2023.

Penyusunan Renja Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan mampu mendorong tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, konsisten, terintegrasi, dan partisipatif.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, LOKASI, KELOMPOK  
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V. PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

#### 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi memuat kajian terhadap realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan. Pada Tahun 2021 mengampu dua urusan yaitu: Urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang terbagi dalam tiga Program yaitu:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- B. Program Kepegawaian Daerah**
- C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Yang terbagi dalam 11 Kegiatan dan 26 sub kegiatan sebagai berikut:

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **B. Program Kepegawaian Daerah**

- 1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - a. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
  - b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
  - c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
  - d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
  - e. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
- 2. Mutasi dan Promosi ASN
  - a. Pengelolaan Mutasi ASN
- 3. Pengembangan Kompetensi ASN
  - a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
  - b. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

### C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan Kompetensi Teknis
  - a. Teknis Umum. Inti. dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
2. Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
  - a. Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan

Untuk mengetahui pelaksanaan atas Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD tahun 2022 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berikut disajikan tabel sebagai berikut:



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia s.d Tahun 2022  
Kota Blitar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2022	
1	2	3	4	5					6	7	8 = (7/6)		9	10 = (5+7+9)
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84 baik					83	83,65	baik
5	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan.	100%					58,599,600	100%	100%
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi,SPP, SOP,Renja, RKA, DPA,PRKA, DPPA)	50 dokumen					10 dokumen	10 dokumen	100%
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran kinerja tribulan)	40 dokumen					8 dokumen	8 dokumen	100%
5	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Partisipasi Perangkat daerah dalam agenda kota.	100%					100,00	100%	100%
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	11 orang/bulan					33 orang	33 orang	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2022	
									Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Honorer/pegawai tidak tetap yang diberikan honorarium/gaji	-					80 orang	80 orang	100%
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis Lapo Keuangan Bulanan/Semeste yang disusun	60 laporan					12 dokumen	12 dokumen	100%
5	0	0	2.0		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Partisipasi Perangkat daerah dalam agenda kota.</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5	0	0	2.0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti Jumlah publikasi program/ kegiatan perangkat daerah	20 event 5 kali					4 event 1 kali	4 event 1 kali	100%
5	0	0	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis/ pelatihan/teknis dengan nilai baik	40 orang					29 orang	29 orang	100%
5	0	0	2.0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan sarana prasarana perkantoran.</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan atau peralatan gedung kantor yang tersedia	120 unit					24 unit	24 unit	100%
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	20 jenis					4 jenis	4 jenis	100%
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	7500 dos 340 jenis					1500 dos 68 jenis	1500 dos 68 jenis	86%
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah lembar penggandaan	75 jenis 502788 lembar					15 jenis 102788 lembar	15 jenis 102788 lembar	96%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2022	
									Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3600 buah					720 buah	720 buah	100%
5	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	225 kali					45 kali	45 kali	100%
5	0	0	2.0		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang terbayarkan.</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listri, air, telepon, internet)	1 rekening					1 rekening	1 rekening	100%
5	0	0	2.0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis sarana prasarana yang terpelihara.</b>	<b>100%</b>					<b>100,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	2 unit 9 unit					2 unit 9 unit	2 unit 9 unit	100%
5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, mesin fax)	440 unit					88 unit	88 unit	100%
5	0	0	2.0	1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	280 unit					56 unit	56 unit	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2022		
									Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
5	0	0			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	74%					49,00%	49,00%	100%	
						Persentase data kepegawaian yang valid	78%						58,00%	58,00%	100%
						Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	91,58%						90,98%	90,98%	100%
						Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	94,66%						88,86%	88,86%	100%
						Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	50,50%						41,40%	41,40%	100%
						Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	51,01%						41,93%	41,93%	100%
5	0	0	2.0			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang dikelola data kepegawaiannya.	48,90%					8,00	8,00	100%
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah ASN yang mengikuti uji kesehatan Jumlah 250 dokumen dokumen formasi ASN 250 Kartu Jumlah 100 orang dokumen sumpah janji PNS 1 kali Jumlah Kartu Pegawai yang diusulkan 250 SK 150 SK Jumlah peserta rapat kebutuhan ASN 2 SK Jumlah seleksi penerimaan ASN Jumlah SK Pengangkatan ASN Jumlah SK Pengangkatan calon ASN Jumlah SK Perberhentian dan perpanjangan PTT	250 orang 1 dokumen 250 dokumen 250 Kartu 100 orang 1 kali 250 SK 150 SK 2 SK				250 orang 1 dokumen 250 dokumen 250 Kartu 100 orang 1 kali 250 SK 150 SK 2 SK	250 orang 1 dokumen 250 dokumen 250 Kartu 100 orang 1 kali 250 SK 150 SK 2 SK	100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2022	
									Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yang terbit Jumlah pensiun yang memperoleh Tunjangan Hari Tua (THT) dan pensiun bulanan Jumlah peserta sosialisasi klaim otomatis BUP Jumlah SK pensiun yang terselesaikan						137 buah 137 orang 150 orang 137 SK	137 buah 137 orang 150 orang 137 SK	100%
5	0	0	2.0	0	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Hibah						1 lembaga	1 lembaga	100%
5	0	0	2.0	1	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memiliki berkas data kepegawaian Jumlah ASN yang terdokumentasi dalam data digital kepegawaian	700 orang 1400 orang					700 orang 1400 orang	700 orang 1400 orang	100%
5	0	0	2.0		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase Asn yang ditempatkan dan dipromosikan</b>	<b>70%</b>					<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
5	0	0	2.0	0	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang memproses kenaikan pangkat, berkala, PAK dan PMK Jumlah peserta sosialisasi kepegawaian Jumlah SK Penempatan ASN	2100 orang 1500 orang 2500 SK					2100 orang 300 orang 500 SK	2100 orang 300 orang 500 SK	100%
5	0	0	2.0		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas ASN</b>	<b>42%</b>					<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>
5	0	0	2.0	0	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti coaching dan mentoring Jumlah ASN yang mengikuti orientasi ASN	350 orang 1250 orang					70 orang 250 orang	70 orang 250 orang	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2022	
									Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	0	0	2.0	0	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan/Pelatih Dasar bagi CPNS	250 Orang				250 Orang	50 Orang	100%	
3	2	3	3	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural		29 Orang				29 Orang	29 Orang	29 Orang		
					Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Kultural/Uji Kompetensi Jumlah dokumen Evaluasi Dampak (EDD)	150 Orang				150 Orang	150 Orang	150 Orang		
					Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Uji Kompetensi/Sertifikasi Kompetensi	1 Dokumen 5 orang				1 Dokumen 5 orang	1 Dokumen 5 orang	1 Dokumen 5 orang		
5	0	0	2.0		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		96,16%				90,36%	10	10	
3	2	4												



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2022	
									Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang difasilitasi uji kesehatan	8 orang				8 orang	8 orang	1	
	3	2	4	2		Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan	200 orang				200 orang	200 orang	200 orang	
						Jumlah ASN yang memperoleh kelengkapan kerja	600 orang				600 orang	600 orang	600 orang	
						Jumlah inspeksi mendadak (SIDAK) yang dilaksanakan	5 kali				5 kali	5 kali	5 kali	
						Jumlah Karis/Karsu yang terbit	50 buah				50 buah	50 buah	50 buah	
						Jumlah LHKPN yang dilaporkan	160 orang				160 orang	160 orang	160 orang	
						Jumlah LP2P yang dilaporkan	2000 orang				2000 orang	2000 orang	2000 orang	
						Jumlah pengajuan cuti yang ditindaklanjuti	250 orang				250 orang	250 orang	250 orang	
						Jumlah peserta pemantapan tugas	200 orang				200 orang	200 orang	200 orang	
						Jumlah peserta peningkatan motivasi pegawai	400 orang				400 orang	400 orang	400 orang	
						Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian	300 orang				300 orang	300 orang	300 orang	
						Jumlah SKP yang dievaluasi	1500 SKP				1500 SKP	1500 SKP	1500 SKP	
						Persentase kasus indisipliner yang ditindaklanjuti	80 %				80 %	80 %	80 %	
						Persentase pengajuan ijin cerai yang ditindaklanjuti	80 %				80 %	80 %	80 %	
5	0	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Peningkatan Persentase ASN dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah.</b>	<b>96,85%</b>				<b>96,65</b>	<b>96,02</b>	<b>99,14</b>	
5	0	0	2.0		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi Teknis.</b>	<b>7,20%</b>				<b>1,20</b>	<b>0,80</b>	<b>11,11</b>	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2022	
									Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya Persentase ASN yang mengajukan ijin tugas belajar dan ijin belajar yang ditindaklanjuti Persentase ASN yang mengajukan ujian dinas dan penyesuaian ijazah yang ditindaklanjuti	1500 orang 98 % 98 %					300 orang 98 % 98 %	300 orang 98 % 98 %	81.1 indeks

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 diatas menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 3 (tiga) Program dengan 11 (sebelas) indikator program, 11 (sebelas) kegiatan dengan 14 (empat belas) indikator kegiatan dengan rata-rata tingkat ketercapaian indikator sangat tinggi, diatas 91%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 20 Tahun 2022. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. perencanaan operasional dan pelaksanaan program kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
6. pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan kota;
7. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
8. pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
9. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
12. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

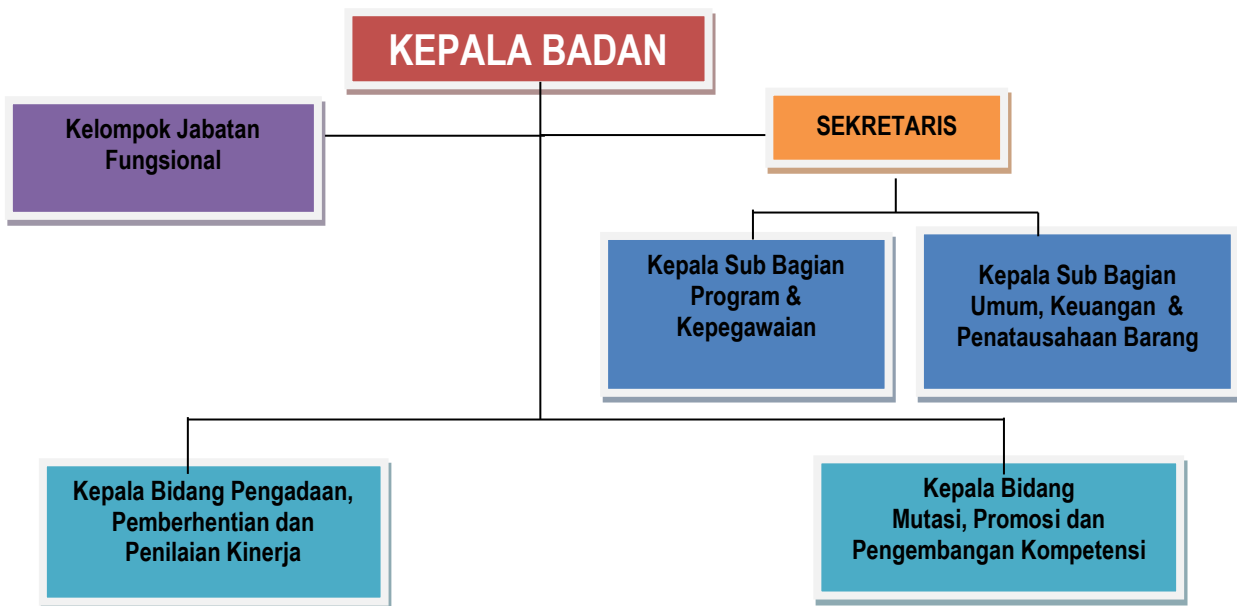
13. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
14. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Kepala Badan  
Merupakan pimpinan SKPD dengan eselon II/b
2. Sekretaris  
Merupakan pimpinan sekretariat dengan eselon III/a, yang membawahi para Kepala Sub Bagian dengan eselon IV/a, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Program dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatusahaan Barang
3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja  
Merupakan pimpinan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja dengan eselon III/b.
4. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai  
Merupakan pimpinan Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan eselon III/b
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

**Gambar 2.1.**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kota Blitar**



Untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu dilakukan pengukuran kinerja. Diperlukan proses sistematis dan berkesinambungan untuk membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kinerja sasaran strategis dengan tingkat hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berdasarkan Rencana Strategis. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Blitar  
(Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021)

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra 2016-2021				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-3)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Penempatan dan Promosi Aparatur sesuai dengan Kompetensinya			95%	-	-	-	95,80%	-	-	-	Didukung peran aktif ASN untuk meningkatkan kompetensi dengan peningkatan jenjang pendidikan, mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah, mengikuti diklat yang sesuai dengan tupoksi, mengikuti uji kompetensi (fit & proper test) dengan hasil yang memuaskan
2.	Persentase ASN yang menyusun SKP Sesuai Standart			50%	-	-	-	97,18%	-	-	-	Didukung peran aktif dari OPD pengumpul SKP yang akan di evaluasi sesuai standart

Sumber: Laporan Kinerja, 2021



Sistem Mutasi dan Promosi dengan indikator penempatan dan promosi Aparatur Sesuai Dengan Kompetensinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi kontra produktif.

Peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme PNS dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga Persentase rekrutmen, penempatan dan promosi pegawai yang sesuai kompetensi dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 pada misi ke-6 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.

Dalam upaya untuk meningkatkan persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Peimpinan Tinggi (JPT) Pratama *Assessment talent mapping* sebanyak 2x, dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Pelaksanaan Pertama**

Pelaksanaan pertama bertujuan untuk mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Blitar.

Dilaksanakan secara bertahap dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021 dan dilaksanakan melalui tahapan – tahapan yang telah ditentukan.

#### **2. Pelaksanaan Kedua**

Pelaksanaan kedua bertujuan untuk mengisi 11 (sebelas) posisi Jabatan Pimpinan tinggi Pratama yang kosong yaitu:

- a. Kepala Dinas Kesehatan
- b. Kepala Dinas Sosial
- c. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- f. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- g. Kepala Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik
- h. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- i. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penguulungan Bencana Daerah
- j. Staf Ahli Walikota Blitar Bidang Kemasyarakatan dan SDM
- k. Kepala Dinas Pendidikan

Dilaksanakan secara bertahap dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021 sampai dengan pelantikan pejabat yang bersangkutan.

Pada akhir tahun 2021 Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan rotasi pegawai struktural, hal tersebut untuk menjawab amanat dari undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang tersebut mengatur segala sesuatu tentang Aparatur Sipil Negara baik itu mengenai jenis, status dan kedudukan Aparatur Sipil Negara, jabatan, hak dan kewajiban ASN, Kelembagaan, KASN, Susunan dan seleksi KASN, Manajemen ASN, pangkat dan jabatan ASN, serta Mutasi, penggantian dan pemberhentian ASN.

Penempatan dan promosi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar pada tahun 2021 berdasarkan dari Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural dan Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan sebagai fungsional tertentu yang ada di Kota Blitar.

Persentase Aparatur Sipil Negara yang Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Sesuai Standart pada tahun 2021 tercapai melebihi target, hal itu didorong atas kesadaran dan tanggungjawab para ASN disamping reward yang diberikan pemerintah Kota Blitar dengan memberikan tunjangan kinerja yang baik kepada seluruh ASN.

Tabel 2.2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Blitar  
(Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026)

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra 2016-2021				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-3)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Sistem Merit			-	260	270	280	-	262	270	280	Didukung oleh komitmen , strategi dan program yang efektif dalam Perencanaan Kebutuhan Pegawai, pengadaan, pembinaan Karir dan Peningkatan Kompetensi, mutasi, Rotasi dan Promosi, pengelolaan Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, perlindungan serta sistem informasi yang mendukung pelaksanaan Sistem Merit
2.	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN			-	11,32%	13,02%	14,73%	-	12%	13%	15%	Didukung peran aktif ASN untuk meningkatkan kompetensi dengan peningkatan jenjang pendidikan, mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah, mengikuti diklat baik secara klasikal maupun daring yang sesuai dengan tupoksi, mengikuti uji kompetensi (fit & proper test) dengan hasil yang memuaskan
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-	A (86,30)	A (86,35)	A (86,36)	-	A (86,30)	A (86,35)	A (86,36)	Didukung peran aktif dari seluruh elemen dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertib melaporkan setiap capaian kinerja secara tepat waktu dan sesuai standart

Sumber: Laporan Kinerja Tribulanan, 2022

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2023, dilakukan terlebih dahulu dengan inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah :

1. Belum optimalnya jumlah rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan
2. Belum optimalnya mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kompetensinya
3. Belum adanya standar kompetensi jabatan pada semua jabatan
4. Pelaksanaan diklat belum sesuai kebutuhan organisasi dan individu
5. Masih banyaknya tenaga fungsional tertentu yang belum memiliki sertifikasi kompetensi.
6. Pemberhentian Tenaga Tidak Tetap yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Tantangan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah :

1. Perubahan organisasi perangkat daerah akan berdampak pada penataan dan pengelolaan jabatan dan sumber daya manusia yang ada;
2. Adanya kebijakan minus growth dimana penerimaan PNS baru harus lebih kecil dibandingkan dengan yang purna tugas (pensiun)
3. Adanya lelang terbuka jabatan bagi pejabat eselon;
4. Penyetaraan jabatan menjadi tenaga fungsional yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan pengampu.

Peluang Pengembangan Pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah

1. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan dengan system merit melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
2. Penerapan pengembangan evaluasi kinerja berbasis online yang akan terintegrasi dengan sistem Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai

berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem *punishment* yang lebih tegas

3. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
4. Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan *Road Map* reformasi birokrasi pemerintah Kota Blitar dalam bidang SDM aparatur, meliputi:
  - a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan *Minus Growth* (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun serta monitoring dan evaluasi redistribusi /relokasi PNS
  - b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
  - c. Pembangunan *Assesment Center* yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam penyusunan :
    - Dokumen standar kompetensi manajerial
    - Dokumen standar kompetensi bidang
    - Metoda/alat ukur penilaian kompetensi
    - Calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan
    - Kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Blitar

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan hasil analisa terhadap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2024, serta isu-isu penting skala nasional, regional maupun lingkup kota yaitu:

1. Peningkatan kompetensi tenaga fungsional pasca penyetaraan jabatan.
2. Rencana tindaklanjut keputusan penghapusan Pegawai Tidak Tetap

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel dimana pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten, profesional dalam pelayanan publik dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual maka untuk itu diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggungjawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review rancangan awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2023 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tersaji dalam tabel review sebagai berikut:



Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Blitar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>indeks kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>83,25 (baik)</b>	<b>10.299.916.183</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>indeks kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>83,25 (baik)</b>	<b>10.299.916.183</b>	
	<b>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>21.936.444</b>	<b>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>21.936.444</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.185.568	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.185.568	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	16.750.876	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	16.750.876	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>8.006.081.384</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>8.006.081.384</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	8.001.533.494	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	8.001.533.494	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes SKPD	12 Laporan	4.547.890	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes SKPD	12 Laporan	4.547.890	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>1.270.024.706</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>1.270.024.706</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	1.051.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	1.051.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	59.052.830	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	59.052.830	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	159.971.876	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	159.971.876	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase keseterediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>562.894.162</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase keseterediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>562.894.162</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.438.314	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.438.314	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.419.472	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.419.472	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	42.890.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	42.890.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.534.376	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.534.376	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokume	6.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokume	6.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	444.012.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	444.012.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>80.183.196</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>80.183.196</b>	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	40.183.196	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	40.183.196	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	40.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>198.416.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>198.416.000</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	78.416.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	78.416.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>160.380.291</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>160.380.291</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	63.580.836	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	63.580.836	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	35.929.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	35.929.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.870.255	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.870.255	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan</b>	55%	4.998.766.151	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan</b>	55%	4.998.766.151	
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase data kepegawaian yang valid</b>	63%			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase data kepegawaian yang valid</b>	63%		
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi</b>	91,18%			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi</b>	91,18%		
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80</b>	90,16%			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80</b>	90,16%		
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi</b>	43,67%			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi</b>	43,67%		
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi</b>	44,20%			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi</b>	44,20%		
	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui</b>	8%	2.068.423.315	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui</b>	8%	2.068.423.315	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan pensiun tepat waktu	100%			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan pensiun tepat waktu	100%		
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase data kepegawaian yang dikelola	50%			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase data kepegawaian yang dikelola	50%		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	30.640.424	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	30.640.424	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.482.454.096	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.482.454.096	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokume	72.339.255	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokume	72.339.255	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	350.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	350.000.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	80.545.080	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	80.545.080	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 dokumen	52.444.460	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 dokumen	52.444.460	
	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN yang ditempatkan</b>	<b>70%</b>	<b>818.210.625</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN yang ditempatkan</b>	<b>70%</b>	<b>818.210.625</b>	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	818.210.625	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	818.210.625	
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>7%</b>	<b>1.816.413.695</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>7%</b>	<b>1.816.413.695</b>	
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN tenaga fungsional yang melaksanakan diklat</b>	<b>5,5%</b>			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN tenaga fungsional yang melaksanakan diklat</b>	<b>5,5%</b>		
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	250 Orang	352.685.567	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	250 Orang	352.685.567	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4 Dokumen	1.196.634.774	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4 Dokumen	1.196.634.774	
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	8.785.138	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	8.785.138	
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	16 Orang	258.308.216	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	16 Orang	258.308.216	
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase SKP yang diverifikasi</b>	<b>91,66%</b>	<b>295.718.516</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase SKP yang diverifikasi</b>	<b>91,66%</b>	<b>295.718.516</b>	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Laporan	88.746.057	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Laporan	88.746.057	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	92.736.511	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	92.736.511	
	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	160 Orang	90.282.204	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	160 Orang	90.282.204	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	17.489.711	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	17.489.711	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	2 Dokumen	6.464.033	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	2 Dokumen	6.464.033	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah</b>	<b>96,70%</b>	<b>943.914.163</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah</b>	<b>96,70%</b>	<b>943.914.163</b>	
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis</b>	<b>1,20%</b>	<b>943.914.163</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis</b>	<b>1,20%</b>	<b>943.914.163</b>	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	109 Orang	943.914.163	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	109 Orang	943.914.163	
					<b>16.242.596.497</b>					<b>16.242.596.497</b>	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun PD dalam hal penyediaan panduan program, kegiatan dan sub kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

Tabel 2.5  
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2023  
Kota Blitar

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar pada tahun 2023 tidak mendapat usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan. Baik usulan bersumber dari Musrenbang RKPD maupun bersumber dari Pokok-pokok Pikiran DPRD.



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan Nasional dan sesuai PMDN No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, dimana secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang telah disinkronkan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan serta sesuai PMDN No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 2 (dua) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

##### 1. *Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia*

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2020 – 2024 yaitu : **"Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**. Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara tersebut adalah:

##### a. **Profesional artinya,**

1. Pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat,
2. Pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

**b. Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu:**

- (a) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- (b) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara

Dalam Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar 2021 – 2026 adalah **Meningkatnya Profesionalitas ASN**. Beberapa unsur yang terkandung selaras dengan visi BKN yaitu **Mewujudkan Aparatur yang Profesional**.

**2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia**

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020 - 2024 yaitu **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”**. Yang mana visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, kementerian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah dan Terintegrasi dan Berbasis Elektronik;

2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional dan Kompetitif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani;
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Kementerian PANRB menetapkan nilai-nilai yang menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian PANRB mewujudkan Kementerian PANRB sebagai institusi pemerintahan yang berkelas dunia, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap, yaitu:

### **1. Integritas**

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam ASN Kementerian PANRB harus melaksanakan tugas dengan jujur serta konsisten antarperkataan dengan perbuatan, berperilaku terpuji, disiplin dan penuhdedikasi berdasarkan norma dan etika.

### **2. Profesional**

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama.

### **3. Akuntabel**

Dalam akuntabel terkandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB harus bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil.

### **4. Melayani**

Melayani terkandung makna bahwa dalam bekerja seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB harus menempatkan Kementerian/Lembaga/Pemda lain sebagai pihak yang harus didahulukan.

### 5. *Kolaboratif*

Kolaboratif mengandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di Kementerian PANRB saling membuka diri, menerima pendapat orang lain dan saling menghargai.

### 6. *Inovatif*

Inovatif mengandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di Kementerian PANRB melakukannya dengan cara yang baru, kreatif, inventif, dan imajinatif, mengikuti perkembangan terkini, tidak anti terhadap perubahan.

### 7. *Kesempurnaan (Komitmen pada Kualitas)*

Dalam kesempurnaan mengandung makna bahwa dalam bekerja, dibutuhkan ketekunan sekaligus ketepatan, agar menghasilkan keluaran yang maksimal, dengan tingkat kesalahan nol persen.

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tujuan BKPSDM Kota Blitar telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

## 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, yang menjadi tahun peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan tema: **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional Berbasis Teknologi Informasi.**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar mengemban tema pelayanan publik dan tata kelola mengarah pada isu strategis daerah dalam pemantapan penerapan *good governance* dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi. Dan berupaya dalam pencapaian misi 5 RPJMD “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”, maka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan menjadi penekanan pada tahun 2023 ini.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dimaksudkan untuk :



1. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
3. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *criteria specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond serta continuously improve*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi Kota Blitar, visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Misi Kota Blitar yang menyatakan keterkaitan dengan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar adalah Misi ke 5, yaitu :

## “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, professional, berbasis teknologi informasi sehingga pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan.

Dalam mewujudkan misi tersebut serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar. yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar

No	Tujuan	Target Akhir Tahun Rencana (2026)	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan / Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	80,50	Indeks Profesionalitas ASN	Perhitungan formulasi pengukuran indeks Profesionalitas ASN dengan pembobotan dari 4 (empat) unsur : 1. Pendidikan, 2. Kompetensi ASN melalui diklat teknis, fungsional, struktural, 3. Penilaian Kinerja melalui SKP 4. Disiplin seluruh ASN

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar adalah “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara” dimana tujuan tersebut telah sesuai dengan Visi Misi Walikota terpilih dan pada RPJMD Kota Blitar. Tujuan tersebut merupakan cita-cita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan terus menjadi cita-cita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar kedepan karena hal tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar 2021 - 2026.

Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar adalah dengan manajemen pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Manajemen pegawai yang dimaksud adalah dengan melakukan rekrutmen, penempatan dan promosi pegawai sesuai dengan analisa jabatan atau kompetensi

dan kebutuhan organisasi yang ada pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Dalam tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai strategi – strategi dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, dengan menuangkan dalam sasaran - sasaran kegiatan guna pencapaian tujuan atau cita – cita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar.

Sasaran - sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian tertuang dalam Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah merumuskan secara menyeluruh program dan kegiatan yang terintegrasi dengan indikator kinerja utama selama 5 tahun perencanaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2021		Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran
			Target	Realisasi						2022	2023
1	2	3					5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	80,00	78,54	80,10	80,20					
							Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	260	270
							Meningkatnya Kapasitas ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN / Jumlah ASN x 100%	11,32%	13,02%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A 86,30	A 86,35	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP BKPSDM	A (86,30)	A (86,35)

## BAB IV

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, LOKASI, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi Kota Blitar di bidang kepegawaian serta tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun rencana kerja tahun 2023 dan menguraikan dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp 15.298.682.334 ,- (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)** yang berasal dari APBD Kota Blitar, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terbagi mejadi 2 (dua) sub kegiatan
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terbagi menjadi 6 (enam) sub kegiatan
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan



## 2. Program Kepegawaian Daerah

- Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terbagi menjadi 6 (enam) sub kegiatan
- Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, terbagi menjadi 4 (empat) sub kegiatan
- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terbagi menjadi 5 (lima) sub kegiatan

## 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan.

Adapun secara garis besar uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, dapat dikemukakan sebagaimana sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kota Blitar**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>indeks kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>83,25 (baik)</b>	<b>10.299.916.183</b>	Pendapatan Bagi Hasil		83,50 (baik)	<b>6.870.398.361</b>
5	03	01	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>100%</b>	<b>21.936.444</b>	Pendapatan Bagi Hasil		100%	<b>49.112.100</b>
5	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	5.185.568	Pendapatan Bagi Hasil		10 Dokumen	18.065.000
5	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	16.750.876	Pendapatan Bagi Hasil		8 Laporan	31.047.100
5	03	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>100%</b>	<b>8.006.081.384</b>	Pendapatan Bagi Hasil		<b>100%</b>	<b>5.213.867.781</b>
5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Orang/bulan	8.001.533.494	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		110 Orang/bulan	5.203.367.431

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	4.547.890	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	10.500.350
<b>5 03 01 2,05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>100%</b>	<b>1.270.024.706</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		<b>100%</b>	<b>399.051.525</b>
5 03 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	1.051.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		3 Paket	78.490.000
5 03 01 2,05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	59.052.830	Pendapatan Bagi Hasil		40 Orang	77.003.615
5 03 01 2,05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	159.971.876	Pendapatan Bagi Hasil		40 Orang	243.557.910
<b>5 03 01 2,06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase keseterediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>100%</b>	<b>562.894.162</b>	Pendapatan Bagi Hasil		<b>100%</b>	<b>650.034.100</b>
5 03 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	19.438.314	Pendapatan Bagi Hasil		3 Paket	22.121.650
5 03 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	6.419.472	Pendapatan Bagi Hasil		1 Paket	10.610.400
5 03 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Paket	42.890.000	Pendapatan Bagi Hasil		36 Paket	63.381.150



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	43.534.376	Pendapatan Bagi Hasil		3 Paket	49.902.000
5	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokume	6.600.000	Pendapatan Bagi Hasil		24 Dokume	6.930.000
5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Laporan	444.012.000	Pendapatan Bagi Hasil		60 Laporan	497.088.900
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>100%</b>	<b>80.183.196</b>	Pendapatan Bagi Hasil		<b>100%</b>	<b>171.720.000</b>
5	03	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	40.183.196	Pendapatan Bagi Hasil		12 Unit	65.750.000
5	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	40.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		15 Unit	105.970.000
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>100%</b>	<b>198.416.000</b>	Pendapatan Bagi Hasil		<b>100%</b>	<b>200.376.400</b>
5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	120.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		12 Laporan	120.000.000
5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	78.416.000	Pendapatan Bagi Hasil		12 Laporan	80.376.400
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>100%</b>	<b>160.380.291</b>	Pendapatan Bagi Hasil		<b>100%</b>	<b>186.236.455</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	63.580.836	Pendapatan Bagi Hasil		9 Unit	70.854.800
5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Unit	35.929.200	Pendapatan Bagi Hasil		92 Unit	54.511.400
5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	60.870.255	Pendapatan Bagi Hasil		1 Unit	60.870.255
5	03	02			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>55%</b>	<b>4.998.766.151</b>	Pendapatan Bagi Hasil		61,00%	<b>7.374.128.938</b>
						<b>Persentase data kepegawaian yang valid</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>63%</b>		Pendapatan Bagi Hasil		<b>68%</b>	
						<b>Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>91,18%</b>		Pendapatan Bagi Hasil		<b>91,18%</b>	
						<b>Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>90,16%</b>		Pendapatan Bagi Hasil		91,56%	
						<b>Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>43,67%</b>		Pendapatan Bagi Hasil		45,94%	
						<b>Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>44,20%</b>		Pendapatan Bagi Hasil		46,47%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8%	2.068.423.315	Pendapatan Bagi Hasil		8%	2.523.744.973
						Persentase layanan pensiun tepat waktu	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%		Pendapatan Bagi Hasil		100%	
						Persentase data kepegawaian yang dikelola	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%		Pendapatan Bagi Hasil		50%	
5	03	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.640.424	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	32.172.445
5	03	02	2,01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.482.454.096	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.513.867.643
5	03	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokume	72.339.255	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Dokume	76.914.868
5	03	02	2,01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	350.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Lembaga	0
5	03	02	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	80.545.080	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	845.723.334
5	03	02	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	52.444.460	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 dokumen	55.066.683

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 02 2,02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase ASN yang ditempatkan</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>70%</b>	<b>818.210.625</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		<b>70%</b>	<b>951.873.855</b>
5 03 02 2,02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	818.210.625	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	951.873.855
5 03 02 2,03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>7%</b>	<b>1.816.413.695</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		<b>7%</b>	<b>3.547.285.158</b>
		<b>Persentase ASN tenaga fungsional yang melaksanakan diklat</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>5,5%</b>		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		<b>5,5%</b>	
5 03 02 2,03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Orang	352.685.567	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		250 Orang	829.460.869
5 03 02 2,03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1.196.634.774	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	2.290.090.729
5 03 02 2,03 07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	8.785.138	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.785.138
5 03 02 2,03 08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Orang	258.308.216	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		16 Orang	418.948.422
5 03 02 2,04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase SKP yang diverifikasi</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>91,66%</b>	<b>295.718.516</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		<b>93,06%</b>	<b>351.224.952</b>
5 03 02 2,04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	88.746.057	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Laporan	105.257.895

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 02 2,04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	92.736.511	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		200 Orang	105.257.895
5 03 02 2,04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 Orang	90.282.204	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		160 Orang	107.185.386
5 03 02 2,04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	17.489.711	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	22.074.134
5 03 02 2,04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	6.464.033	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	11.449.642
<b>5 04 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>96,70%</b>	<b>943.914.163</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		<b>96,75%</b>	<b>1.213.263.620</b>
<b>5 04 02 2,01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis</b>	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>1,20%</b>	<b>943.914.163</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		<b>1,20%</b>	<b>1.213.263.620</b>
5 04 02 2,01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109 Orang	943.914.163	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		109 Orang	1.213.263.620
					<b>16.242.596.497</b>				<b>15.457.790.919</b>

Selain itu pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar juga difokuskan untuk:

1. Mengatasi kekurangan pegawai melalui pengajuan usulan formasi pengadaan CPNS prioritas sesuai kebutuhan dan penerimaan mutasi PNS dari luar daerah secara selektif sesuai kebutuhan;
2. Peningkatan layanan berbasis online system yang terintegrasi;
3. Pengukuran Indeks Profesionalisme Aparatur Negara secara berkelanjutan melalui MySAPK;
4. Pemetaan Potensi PNS;
5. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dengan penyempurnaan regulasi kepegawaian yang dibutuhkan;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian berbasis elektronik serta pengembangan simpeg terintegrasi yang dikembangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar yaitu Sistem Informasi Kepegawaian Online dan Terintegrasi (SIKOI).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2023 sebagai penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2023. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021.

#### **5.1. Catatan Penting**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2023. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

#### **5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2023, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2023

sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

### 5.3. Rencana Tindak Lanjut

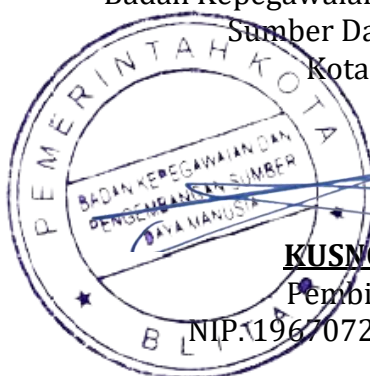
Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana
- d. Dengan ditetapkannya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Blitar, 4 Agustus 2022  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia  
Kota Blitar



**KUSNO, S.Sos**

Pembina Tk. I

NIP.196707221992021002

# RENCANA KERJA BKPSDM

**DIBUAT OLEH:**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

Jalan Merdeka no 105, Kota Blitar

Kode Pos : 66100

Email : [bkdkotablitar@gmail.com](mailto:bkdkotablitar@gmail.com)

No Telp : (0342) 813913-813915,813902

ext . 134-137,162